

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bencana kebakaran merupakan suatu bencana yang dipicu oleh api dan mampu mengakibatkan banyak kerugian mulai dari materi, jiwa, hingga lingkungan. Maka dari itu, bencana kebakaran ini perlu sangat diantisipasi mengingat bencana kebakaran ini tidak dapat diprediksi dimana dan kapan terjadinya. Menurut NFPA (National Fire Protection Association, 2002), pengertian kebakaran adalah sebuah peristiwa oksidasi yang mempertemukan 3 unsur (bahan bakar, oksigen, dan panas) yang dapat menyebabkan kerugian yang besar seperti material (harta benda) atau bahkan korban jiwa. Secara umum kebakaran didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang ditimbulkan api yang tidak dapat dikendalikan dan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang maupun harta benda (Kurniawati, 2013)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widyantoro, 2016), kebakaran dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal seperti: 1) Reaksi bahan mudah terbakar, oksigen, dan panas. 2) Dua faktor penyebab kebakaran yaitu Faktor Alam (*Natural Disaster*) & Faktor Non-Alam (*Man-made Disaster*); 3) Kesulitan dalam Prediksi. Faktor-faktor tersebut mencakup berbagai situasi yang dapat menyebabkan kebakaran, baik yang bersifat alami maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk pengelolaan risiko kebakaran dan upaya pencegahan guna melindungi masyarakat dan lingkungan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Widyantoro, 2016) tersebut menjelaskan bahwa faktor yang sering menyebabkan kebakaran adalah faktor manusia dan faktor alam. Dalam hal ini faktor manusia memang sering menjadi penyebab utama kebakaran, baik karena kelalaian maupun tindakan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. Kelalaian yang dilakukan oleh manusia

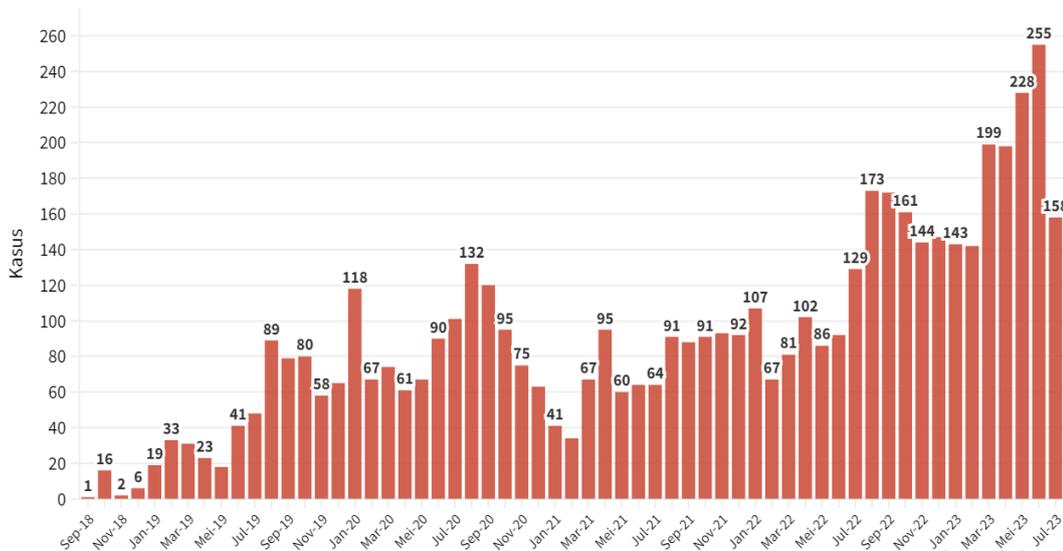
diantaranya dengan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar, seperti kain, kertas, atau bahan bakar, tanpa perhatian terhadap perlindungan khusus dapat meningkatkan risiko kebakaran. Kemudian penggunaan listrik yang tidak aman, misalnya menggunakan kabel yang rusak, *overloading* colokan, atau meremehkan faktor keselamatan listrik, dapat menjadi pemicu kebakaran. Membuang puntung rokok sembarangan atau merokok di tempat yang rentan terhadap kebakaran dapat menimbulkan bahaya. Dan juga meninggalkan api terbuka tanpa pengawasan, seperti lilin, kompor, atau api unggun, dapat menyebabkan kebakaran jika tidak dijaga dengan baik. Selain faktor manusia, juga menyebutkan faktor alam sebagai penyebab kebakaran. Meskipun faktor alam tidak dapat dikendalikan oleh manusia, beberapa kejadian seperti sambaran petir dan letusan gunung api dapat memicu kebakaran hutan atau lahan. Upaya pencegahan dan mitigasi risiko harus dilakukan untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat faktor alam ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa bencana kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat kita prediksi kapan terjadinya dan menimpa pada kita. Namun bahaya kebakaran juga dapat diantisipasi dengan upaya berhati-hati terhadap barang-barang di sekitar kita terutama yang kemungkinan besar dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti benda-benda elektronik dan benda yang mudah terbakar lainnya. Jika telah terjadi bencana kebakaran di suatu bangunan atau pemukiman, maka utamakan keselamatan manusia dibandingkan harta benda. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 26 Tahun 2008 telah menegaskan terkait dengan prioritas keselamatan masyarakat dengan tujuan untuk mendukung kelangsungan kegiatan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup.

Kebakaran dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diperkirakan oleh kemampuan manusia seperti penyebabnya, jumlah cakupannya, dan luasnya sifatnya. Dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran, memang teknologi yang sudah berkembang saat ini dapat membantu memberikan peringatan dini, tetapi berpotensi kecil memberikan waktu dalam persiapan menyelamatkan diri dan bantuan yang datang.

Kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia sendiri cenderung meningkat. Bahkan, peristiwa kebakaran di Indonesia mencetak rekor pada Juni 2023.

Gambar 1.1
Jumlah Kebakaran Di Indonesia
(September 2018 – Juli 2023)



Sumber : Kepolisian RI (Polri)

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebanyak 5.336 telah terjadi kebakaran Sejak September 2018 hingga Juli 2023. Dari data tersebut, 24,79% atau 1.323 kasus telah terjadi sepanjang tahun ini hingga 19 Juli 2023.

Data tersebut memperlihatkan bahwa sepanjang 2023, peristiwa kebakaran yang paling banyak terjadi di daerah Jawa Tengah pada 2023, yaitu 612 kasus. Dalam data tersebut juga tercatat 82 kasus kebakaran terjadi di Jawa Timur. Dan juga 100 kasus kebakaran terjadi di Bali. Kemudian, kebakaran yang terjadi sebanyak 80 kasus dan 59 kasus di daerah Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dilihat dari lokasi kejadiannya, kasus kebakaran paling banyak menimpa perumahan atau pemukiman pada tahun 2023, yaitu 926 kasus. Kemudian kebakaran yang menimpa pada pertokoan dan perkantoran secara berurutan sebanyak 91 kasus dan 43 kasus.

Sebagian besar kota-kota di Indonesia mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan ruang di perkotaan, tetapi ketersediaan ruang terbuka yang

memungkinkan untuk akomodasi penduduk di perkotaan semakin terbatas. Perpindahan penduduk ke kota dan bertambahnya jumlah penduduk akibat proses alami tersebut menyebabkan terjadinya proses peningkatan kepadatan penduduk, permukiman dan bangunan non-pemukiman yang tidak terkendali. Meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan dan kepadatan penduduk serta penurunan kualitas permukiman menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Salah satu permasalahan di perkotaan yang dapat timbul akibat proses ini adalah kebakaran permukiman.

Penurunan kualitas permukiman akan berdampak pada bencana kebakaran permukiman. Dalam penelitian yang dilakukan (Darsono, 2012) menjelaskan bahwa kebakaran permukiman adalah bahaya akibat pancaran api pada bangunan permukiman terutama bangunan rumah yang mengganggu kehidupan manusia. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas permukiman tersebut sangat berpengaruh terhadap kebakaran permukiman dikarenakan memicu api merambat dengan mudah ke bangunan lain.

Kota Bandung termasuk kedalam kota besar dan menjadi salah satu kota dengan tingkat kebakaran yang cukup tinggi dan kian meningkat tiap tahunnya. Kota Bandung, sebagai kota terbesar di Provinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah sekitar 167.31 km². Dengan populasi mencapai 2.469.589 jiwa pada tahun 2023, kota ini menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduknya mencapai 14,93 jiwa per kilometer persegi atau 149 jiwa per hektar, menunjukkan tingkat kepadatan yang cukup tinggi.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Taufiqurrahman & Wijaya, 2013) menyebutkan bahwa penggunaan lahan dan kepadatan penduduk dapat menjadi potensi terjadinya bencana kebakaran. Permasalahan yang dapat terjadi yang disebabkan oleh kepadatan penduduk dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti padatnya permukiman, bangunan, serta sarana umum dapat menjadi pemicu kebakaran.

Situasi wilayah permukiman yang beragam di Kota Bandung, dari perumahan elit hingga permukiman padat penduduk dengan akses terbatas, dapat mempengaruhi tingkat risiko kebakaran rumah. Faktor seperti gang-gang sempit dan infrastruktur yang mungkin tidak memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama di permukiman padat penduduk. Dengan data yang dipublikasikan di portal data Kota Bandung, terlihat bahwa tingkat kebakaran rumah cukup tinggi, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan pencegahan dan strategi penanganan yang efektif untuk mengurangi risiko kebakaran di kawasan tersebut.

Menurut data dan informasi dari portal Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, banyak terjadi kecelakaan kebakaran di Kota Bandung dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat pada tabel kejadian kebakaran di wilayah kota Bandung selama 4 tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2022.

Tabel 1. 1

Tingkat Kejadian Kebakaran di Wilayah Kota Bandung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	272 Kasus
2.	2020	195 Kasus
3.	2021	182 Kasus
4.	2022	195 Kasus
5.	2023	352 Kasus

Sumber : Situs Resmi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir tingkat kebakaran terhadap pemukiman warga cukup tinggi. Bahkan, memasuki pada tahun 2023 kebakaran yang terjadi di Kota Bandung mencapai rekor yaitu 352 kasus kebakaran.

Berdasarkan beberapa kasus kebakaran baru-baru ini, kita masih mengingat jelas terjadi beberapa peristiwa kebakaran tragis yang terjadi, antara lain terbakarnya beberapa kios di Pasar Caringin pada awal Juni lalu bahkan memakan

korban jiwa, kemudian terbakarnya sembilan bangunan di Jalan Peta pada bulan Juni dan api berhasil dipadamkan setelah satu jam kemudian. Di bulan Juli terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk yang diduga disebabkan oleh charger hp yang meledak dan mengakibatkan beberapa rumah terdampak akibat kebakaran tersebut. Kemudian juga terjadi kebakaran dipemukiman padat penduduk yang melahap 3 rumah di Jalan Cihampelas pada bulan Agustus. Masih dibulan Agustus terjadi kebakaran melahap rumah di gang kawasan Jalan Sukajadi Atas, sempat ada kendala dikarenakan akses yang sempit untuk dilalui oleh kendaraan damkar ke lokasi kebakaran.

Penanganan permasalahan bencana kebakaran, salah satu pelayanan jasa yang diberikan aparaturnya kepada masyarakat di bidang penyelamatan yaitu Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Dengan adanya keberadaan, tugas dan fungsi instansi tersebut pada suatu daerah dianggap sangat esensial dan krusial keberadaannya, karena selain melindungi masyarakat dari bencana kebakaran, juga memiliki tugas untuk membantu dalam berbagai musibah dan bencana lainnya, seperti kecelakaan, musibah banjir dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana menjelaskan bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, setiap bangunan wajib terlebih dahulu memiliki sarana pencegah dan penanggulangan kebakaran dan bencana. Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda. Wilayah Kota Bandung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam maupun non alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah lembaga pelaksana pemerintah yang diberi tugas dan

tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana kebakaran dan bencana yang termasuk dalam layanan gawat darurat atau *Rescue* (penyelamatan) seperti *Ambulance* dan Badan SAR Nasional

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung bergerak pada bidang yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, terutama pada keselamatan jiwa. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, dalam melaksanakan tugasnya yaitu penanganan bencana kebakaran. Dinas Kebakaran belum bisa memaksimalkan kinerjanya terutama pada tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang dinilai belum maksimal karena masih menjumpai beberapa kendala.

Salah satu hambatan yang menjadi kendala yang masih dihadapi oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung adalah kurangnya sumber daya manusia atau personel di Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran (DPPK) Kota Bandung, seperti yang diakui oleh Sekretaris DPPK, Rachmat Hidayat, dapat memiliki dampak negatif pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan hanya memiliki 192 personel saat ini, dibandingkan dengan idealnya yang seharusnya mencapai 350 personel lapangan, dapat menunjukkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan (Defico, 2020).

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) adalah indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan pemadam kebakaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota, terdapat standar waktu tanggap untuk daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

1. Pemukiman, Pabrik, Bangunan:

- Waktu Tanggap Maksimal: 15 menit
- Artinya, peristiwa kebakaran yang terjadi di pemukiman, pabrik, atau bangunan harus dapat ditangani oleh pihak pemadam kebakaran dalam waktu maksimal 15 menit setelah menerima laporan atau mendeteksi kebakaran.

2. Hutan atau Lahan:

- Waktu Tanggap Maksimal: 60 menit
- Artinya, kebakaran yang terjadi di hutan atau lahan harus dapat ditangani dalam waktu maksimal 60 menit setelah laporan atau deteksi kebakaran diterima.

Tingkat waktu tanggap yang cepat sangat penting dalam situasi kebakaran untuk meminimalkan kerugian dan risiko. Faktor-faktor seperti lokasi, aksesibilitas, dan kondisi lalu lintas dapat memengaruhi kemampuan untuk merespons dengan cepat. Akan tetapi, kemacetan di perkotaan dan tindakan warga yang mencoba memadamkan kebakaran sendiri sehingga lupa untuk segera melapor kepada petugas kebakaran dapat menjadi kendala serius bagi tim petugas kebakaran.

Terdapat beberapa rencana program dan kegiatan Diskar PB Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2018-2023, dapat terlihat bawah ini:

- 1) Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana,
- 2) Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan dan Logistik,
- 3) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya,
- 4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya,
- 5) Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan,
- 6) Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman,
- 7) Kegiatan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana (4 UPT),
- 8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan,
- 9) Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban,
- 10) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dst.

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung telah melakukan banyak program yang telah dijalankan yang secara *detail* tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2018-2023, namun angka kebakaran dan kerugian masih cukup tinggi.

Perumusan strategi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Perumusan strategi pengembangan dapat dilakukan dengan menentukan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam organisasi secara keseluruhan. (Engkus et al., 2021).

Salah satu upaya mengatasi tingginya tingkat kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk di Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mengembangkan strategi khusus yang terfokus pada permasalahan khusus yang dihadapi di wilayah tersebut. Strategi khusus yang dimaksud adalah strategi yang ampuh dan benar-benar tersusun rapi oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam menangani bencana kebakaran wilayah permukiman padat penduduk. Dengan implementasi strategi khusus yang terukur dan adaptif, diharapkan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat lebih efektif dalam menangani kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk yang sulit diakses.

Peneliti menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) dalam menilai strategi yang diterapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana itu dikatakan efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kebakaran di pemukiman padat penduduk. Dalam teori tersebut menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Dimana dalam bukunya "*The Art of Public Strategy*", (Mulgan, 2009) menjelaskan bahwa tolak ukur efektif atau tidaknya suatu strategi ditentukan

oleh seberapa baik suatu organisasi menjalankan kelima indikator yang terdapat dalam strategi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik membahas terkait dengan “Strategi Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Dalam Mengatasi Masalah Kebakaran Pada Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah personel Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung yang dianggap masih kurang (192 orang ASN) dapat menjadi kendala serius dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi kemampuan dalam merespons kejadian kebakaran dengan cepat dan efektif.
2. Tingkat kebakaran pemukiman yang cukup tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya, khususnya di lingkungan permukiman padat penduduk.
3. Kemacetan di perkotaan dan tindakan warga yang mencoba memadamkan kebakaran sendiri sehingga lupa untuk segera melapor kepada petugas kebakaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinas Kebakaran dan Penanggulan Bencana menjalankan strategi yang telah diterapkan dalam mencapai Tujuan (*purpose*) yang telah ditentukan?
2. Bagaimana perubahan Lingkungan (*environment*) yang terjadi di masyarakat ketika Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menjalankan strategi yang telah diterapkan?

3. Bagaimana Pengarahan (*direction*) yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan strategi yang telah diterapkan?
4. Bagaimana Tindakan (*action*) yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan strategi yang telah diterapkan?
5. Bagaimana Pembelajaran (*learning*) yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana setelah menjalankan strategi yang telah diterapkan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diidentifikasi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tujuan dari strategi yang telah diimplementasikan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam mengatasi kebakaran di wilayah pemukiman padat penduduk.
2. Mendeskripsikan perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat ketika Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menjalankan strategi yang telah diterapkan dalam mengatasi kebakaran di wilayah pemukiman padat penduduk.
3. Mendeskripsikan bagaimana pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan strategi yang telah diterapkan pada saat terjadi kebakaran di wilayah pemukiman padat penduduk.
4. Mendeskripsikan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam menjalankan strategi yang telah diterapkan pada saat terjadi kebakaran di wilayah pemukiman padat penduduk.
5. Mendeskripsikan pembelajaran atau evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana setelah menjalankan strategi yang telah diterapkan dalam mengatasi kebakaran di wilayah pemukiman padat penduduk.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Strategi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam mengatasi masalah kebakaran pada pemukiman padat penduduk di Kota Bandung memiliki potensi manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak.

1) Bagi Masyarakat:

- a. Memberikan wawasan lebih dalam kepada masyarakat tentang upaya pencegahan kebakaran dan tindakan yang perlu diambil saat kejadian kebakaran terjadi. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
- b. Memberikan sarana bagi masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama penelitian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan sikap preventif dan respon cepat terhadap kebakaran.

2) Bagi Peneliti:

- a. Memberikan wawasan lebih mendalam kepada peneliti tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam menangani kebakaran di pemukiman padat penduduk. Ini dapat menjadi kontribusi berharga untuk pengetahuan dan pemahaman di bidang penanggulangan bencana.
- b. Membantu peneliti untuk berpikir secara obyektif dan analitis dalam menghadapi serta memecahkan masalah yang terkait dengan penanganan kebakaran.

3) Bagi Instansi Terkait:

- a. Memberikan masukan berharga kepada instansi terkait, termasuk Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, untuk meningkatkan strategi dan kebijakan dalam penanganan kebakaran di pemukiman padat penduduk.
- b. Mendorong instansi terkait untuk mensosialisasikan tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran. Ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kebakaran merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius terutama apabila terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Kebakaran dapat menimpa pada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tanpa ada peringatan sebelumnya. Namun, kesadaran masyarakat terhadap isu keselamatan dan penyelamatan jiwa ketika terjadi kebakaran masih rendah .(Wekke, 2021).

Kebanyakan peristiwa terjadinya kebakaran di perkotaan Kota Bandung dengan kepadatan penduduknya disebabkan oleh kecerobohan manusia itu sendiri yang kurang peduli dalam memeriksa keamanan arus listrik, sehingga menyebabkan terjadinya korsleting listrik yang mulanya berupa percikan api yang tidak sempat diatasi sehingga menyebabkan api semakin membesar. Selain faktor dari arus listrik, kebakaran di pemukiman padat penduduk dapat disebabkan oleh kompor, hubungan arus pendek listrik, kebocoran gas atau sumber penyulut lainnya. Bahkan faktor alam pun dapat menjadi faktor pendorong penyebab terjadinya kebakaran, yaitu musim kemarau yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran karena benda menjadi mudah terbakar akibat kekeringan, suhu udara meningkat pada siang hari dan bahkan terus meningkat setiap harinya.

Penanganan dalam permasalahan ini terdapat beberapa rencana program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2018-2023. Namun, angka kebakaran dan kerugian yang diakibatkan masih tinggi.

Strategi pelayanan khusus yang dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sangat diperlukan dalam menangani permasalahan kebakaran terutama yang terjadi pada pemukiman padat penduduk. Karena pelayanan dalam penanganan kebakaran yang dilakukan pada pemukiman jarang penduduk tidak dapat disamakan dengan pelayanan dalam penanganan kebakaran padat penduduk. Perlu adanya strategi pelayanan secara khusus pada kasus kebakaran yg terjadi di pemukiman padat penduduk. Secara umum, strategi adalah

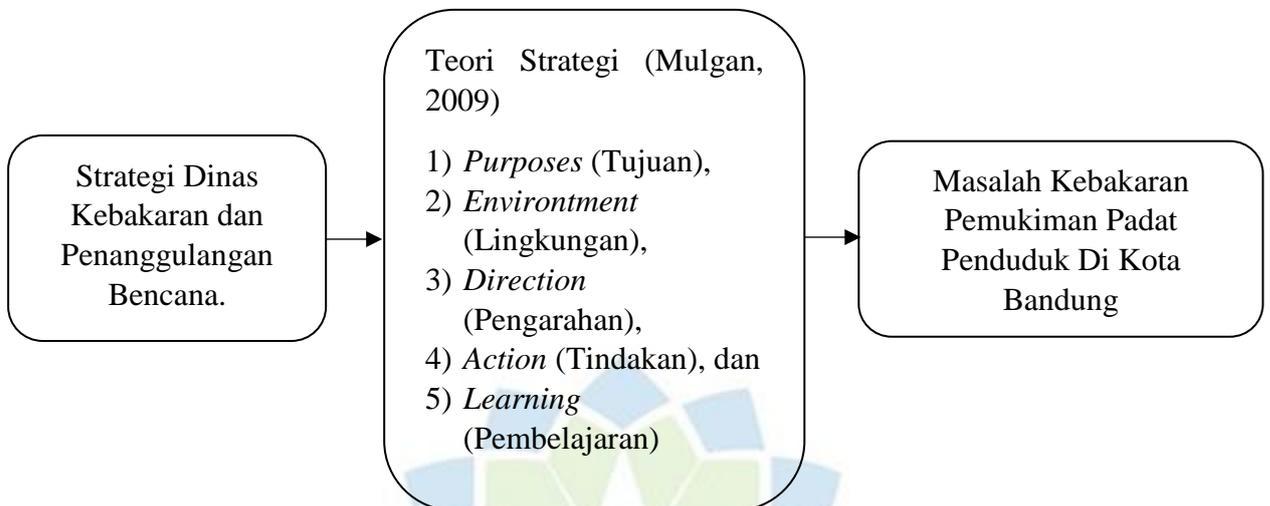
cara untuk mencapai tujuan. Strategi memiliki pengertian bermacam-macam, menurut Hamel dan Prahalad dalam (Umar, 2010) strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan.

Berdasarkan buku "*The Art of Public Strategy*", (Mulgan, 2009) memberikan pemahaman yang baik tentang konsep strategi publik. Dia menekankan bahwa strategi publik merupakan penggunaan sistematis dari sumber daya dan kekuatan publik oleh lembaga publik, khususnya pemerintah, untuk mencapai kepentingan publik atau kepentingan umum.

Teori strategi yang dikenal adalah Teori Strategi dari (Mulgan, 2009), menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator, yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran). Dalam teori strategi yang dikemukakan Geoff Mulgan, kelima indikator tersebut memiliki pendekatan baik secara politik dan pemerintahan dalam menyusun dan merancang strategi dan mengimplementasikan strategi yang dibuat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat publik.

Jika dilihat dari sudut pandang teori di atas dapat menjelaskan dan memberikan tolak ukur pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan sebagai teori pemerintahan atau strategi analitis. Berdasarkan teori ini strategi dapat dikatakan efektif apabila kelima indikator dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan hasil penelitiannya, peneliti beranggapan bahwa teori strategi dari Geoff Mulgan dinilai sangat relevan dengan penelitian ini.

Gambar 1.2
Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2024)

